

## Buku

Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analsia Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Gie, The Liang, et al., 1998. *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Hadjon, Philipus M., et al., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Haryoto, Edie, et al., 2020, *Kebijakan Publik Penanggulangan COVID-19*, RMBooks, Jakarta

Indrati, Maria Farida, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta

Islamy, Irfan, 2009, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

Nogi, Hessel dan Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Y.A.P, Yogyakarta.



Grasindo, Jakarta

Rakhmat, Muhamad, 2014, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, LoGoZ Publishing,

Bandung

Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soeryono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soemitro dan Ronny Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indah, Jakarta.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suharno, 2008, *Prinsip Prinsip Dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta.

Suharno, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta .

Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta

Wahab, Solichin Abdul, 2008, *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi  
Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

Wijayanto, Anjar, 2007, *Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*,  
Universitas Merdeka, Malang.

Winarno, Budi, 2002, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.

## **Artikel Jurnal/Majalah**

Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah”, Vol.

8, No. 2, Mei 2020

Fauzi, Ahmad, “Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik

Dalam Penanganan Pandemi COVID-19”, Vol. 16, No. 1, Juli 2020

Handayani, Diah, *et al.*, “Penyakit Virus Corona 2019”, Vol. 40, No. 2, April 2020

Kusuma, Erwin Dwijaryantaka, *et al.*, “Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan

Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020”, Vol. 27 No. 6,

Januari 2021

Nasruddin, Rindam, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah”, Vol. 7, No. 7, Juni 2020

Setiadi, Wicipto, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum

Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Vol. 6, No. 4, Desember 2009

Susilo, Adityo, *et al.*, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini (Coronavirus

Disease 2019: Review of Current Literatures)”, Vol. 7, No. 1, Maret 2020

Syafrida dan Ralang Hartati, “Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia”, Vol. 7, No. 6,

Mei 2020

Syamsuadi, Amir, “Memahami Pelayanan Publik dalam Birokrasi Pemerintahan”, Oktober

2019

Wibowo, Richo Andi, “Strengthening the Effectiveness of Exclusion Mechanism in Public

Procurement: A Comparative Legal Study Between Indonesia and The Netherlands”,

Desember 2017

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1959 Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Wilayah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVTD-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona

Virus Disease 2019

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona 'Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Skala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Menteri Dalam Negeri

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease Tahun 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Ketentuan

Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

Daffa, Syafruddin, 2020, Analisis Pengaruh Gender dan Tingkatan Usia Terhadap Fake News

Awareness Terkait COVID-19 dan Intention to Share dengan Pendekatan Signal



Yogyakarta

Effendi, Habib Haidar Pradana, 2020, Implementasi E-Government Dalam Pencegahan Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jatmiko, Ageng Purwo, 2012, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya Sebagai Kearifan Lokal, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Nugroho, M. Adhitya, 2020, Analisis Pengukuran Tingkat Kecemasan Dan Respon Perilaku Masyarakat Terhadap Wabah Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19), Skripsi, Fakultas Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Syahwal, Ardi, 2020, Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY Dalam Pelayanan Publik Terhadap Penyelesaian Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa KKN-PPM UGM, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Wiriawan, Arikah, 2020, Dampak Wabah Pandemi COVID-19 Pada Perilaku dan Pengeluaran Konsumen di Jakarta, Skripsi, Fakultas Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Aplikasi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka/

West, a Thomson Business.

Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara

## Internet

Ayo Cirebon, "Polisi Khawatir Demo Tolak Omnibus Law Jadi Klaster Baru Corona",

[https://www.ayocirebon.com/read/2020/10/06/6688/polisi-khawatir-demo-tolak-](https://www.ayocirebon.com/read/2020/10/06/6688/polisi-khawatir-demo-tolak-omnibus-law-jadi-klaster-baru-corona)

[omnibus-law-jadi-klaster-baru-corona](https://www.ayocirebon.com/read/2020/10/06/6688/polisi-khawatir-demo-tolak-omnibus-law-jadi-klaster-baru-corona) diakses pada tanggal 7 Oktober 2020

Berita DIY, "Penyesuaian Aturan Terbaru PPKM 5-18 Oktober dan Daftar Wilayah PPKM

Level 3, 2, dan 1", [https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702735626/penyesuaian-aturan-terbaru-ppkm-5-18-oktober-dan-daftar-wilayah-ppkm-level-3-2-dan-1?page=all)

[702735626/penyesuaian-aturan-terbaru-ppkm-5-18-oktober-dan-daftar-wilayah-ppkm-](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702735626/penyesuaian-aturan-terbaru-ppkm-5-18-oktober-dan-daftar-wilayah-ppkm-level-3-2-dan-1?page=all)

[level-3-2-dan-1?page=all](https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702735626/penyesuaian-aturan-terbaru-ppkm-5-18-oktober-dan-daftar-wilayah-ppkm-level-3-2-dan-1?page=all) diakses pada tanggal 27 September 2021.

Berita Satu, "Ini Alasan DKI Masih Terapkan PPKM Level 3 di Tengah Kasus Covid-19 yang

Terkendali", [https://www.beritasatu.com/megapolitan/832621/ini-alasan-dki-masih-](https://www.beritasatu.com/megapolitan/832621/ini-alasan-dki-masih-terapkan-ppkm-level-3-di-tengah-kasus-covid19-yang-terkendali)

[terapkan-ppkm-level-3-di-tengah-kasus-covid19-yang-terkendali](https://www.beritasatu.com/megapolitan/832621/ini-alasan-dki-masih-terapkan-ppkm-level-3-di-tengah-kasus-covid19-yang-terkendali) diakses pada tanggal 4

Oktober 2021.

CNN Indonesia, "Habis PSBB Terbitlah PPKM, Apa Bedanya?",

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108070438-20-590992/habis-psbb-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108070438-20-590992/habis-psbb-terbitlah-ppkm-apa-bedanya)

[terbitlah-ppkm-apa-bedanya](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108070438-20-590992/habis-psbb-terbitlah-ppkm-apa-bedanya) diakses pada tanggal 21 Juni 2021.

CNN Indonesia, "PPKM Jawa Bali Jilid II Resmi Berlaku Hari Ini",

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210126063341-20-598338/ppkm-jawa-bali-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210126063341-20-598338/ppkm-jawa-bali-jilid-ii-resmi-berlaku-hari-ini)

[jilid-ii-resmi-berlaku-hari-ini](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210126063341-20-598338/ppkm-jawa-bali-jilid-ii-resmi-berlaku-hari-ini) diakses pada tanggal 16 Maret 2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200921135847-20-548942/sepekan-PSBB->

[jilid-ii-covid-di-dki-naik-6960-kasus](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200921135847-20-548942/sepekan-PSBB-jilid-ii-covid-di-dki-naik-6960-kasus) diakses pada tanggal 21 September 2020

Detik, "Apa Itu PPKM yang Gantikan PSBB Jawa-Bali? Ini Info Lengkapnya",

<https://news.detik.com/berita/d-5324613/apa-itu-ppkm-yang-gantikan-psbb-jawa-bali->

[ini-info-lengkapnya](https://news.detik.com/berita/d-5324613/apa-itu-ppkm-yang-gantikan-psbb-jawa-bali-) diakses pada tanggal 17 Juni 2021

Detik, "Corona Melonjak! Ini Beda Lockdown, PSBB dan PPKM Mikro",

<https://news.detik.com/berita/d-5612127/corona-melonjak-ini-beda-lockdown-psbb->

[dan-ppkm-mikro](https://news.detik.com/berita/d-5612127/corona-melonjak-ini-beda-lockdown-psbb-) diakses pada 20 Oktober 2021.

Detik, "Daripada PSBB, Khofifah Pilih Pembatasan Sosial Berskala Mikro di Jatim",

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5171032/daripada-psbb-khofifah-pilih->

[pembatasan-sosial-berskala-mikro-di-jatim](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5171032/daripada-psbb-khofifah-pilih-) diakses pada tanggal 15 Agustus 2021

Detik, "PPKM Dimulai 11 Januari, Ini Daftar Zona Merah di Pulau Jawa-Bali",

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5326840/ppkm-dimulai-11-januari->

[daftar-zona-merah-di-pulau-jawa-bali](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5326840/ppkm-dimulai-11-januari-) diakses pada tanggal 16 Maret 2021

Detik, "PSBB, PPKM Mikro, dan Lockdown, Bedanya Apa Sih?",

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5615784/psbb-ppkm-mikro-dan-lockdown->

[bedanya-apa-sih](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5615784/psbb-ppkm-mikro-dan-lockdown-) diakses pada 20 Oktober 2021

Detik, "Ternyata Ini Penyebab Yogyakarta Belum Turun Level PPKM",

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5735585/ternyata-ini-penyebab->

[yogyakarta-belum-turun-level-ppkm](https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5735585/ternyata-ini-penyebab-) diakses pada tanggal 1 Oktober 2021.



[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30217/t/Sanksi+Pelanggar+Protokol+Kesehatan+](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30217/t/Sanksi+Pelanggar+Protokol+Kesehatan+Dinilai+Efektif)

[Dinilai+Efektif](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30217/t/Sanksi+Pelanggar+Protokol+Kesehatan+Dinilai+Efektif) diakses pada tanggal 5 September 2021

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, “Apa Saja Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Bidang Kesehatan Untuk Penanganan COVID-19?”,

[https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apa-](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apa-saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untuk-penanganan-covid-19.html)

[saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untuk-penanganan-covid-](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apa-saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untuk-penanganan-covid-19.html)

[19.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2829-apa-saja-kebijakan-pemerintah-indonesia-di-bidang-kesehatan-untuk-penanganan-covid-19.html) diakses pada tanggal 12 Agustus 2021

GeneCraft Labs, “Sejarah Pandemi dalam Kehidupan Manusia”,

<https://genecraftlabs.com/id/sejarah-pandemi-dalam-kehidupan-manusia/> diakses pada

tanggal 19 Januari 2021

GeneCraft Labs, “Sejarah Coronavirus: Seluk Beluk si Penyebab Wabah COVID-19”,

<https://genecraftlabs.com/id/sejarah-Coronavirus-penyebab-wabah-COVID-19/> diakses

pada tanggal 19 Januari 2021

Hukum Online, “Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)”,

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/)

[pidana-perdata-dan-administratif/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/) diakses pada tanggal 5 April 2021

Jawa Pos, “Ini Alasan Jokowi Tolak Permintaan Anies Lockdown Jakarta”,

[https://www.jawapos.com/nasional/31/03/2020/ini-alasan-jokowi-tolak-permintaan-anies-](https://www.jawapos.com/nasional/31/03/2020/ini-alasan-jokowi-tolak-permintaan-anies-lockdown-jakarta/)

[lockdown-jakarta/](https://www.jawapos.com/nasional/31/03/2020/ini-alasan-jokowi-tolak-permintaan-anies-lockdown-jakarta/) diakses pada tanggal 27 Juni 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “sanksi”, <https://kbbi.web.id/sanksi> diakses pada tanggal 9

Agustus 2021

yang sering di pertanyakan tentang berbagai hal yang berhubungan langsung dengan Pusat Data dan Informasi.", <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html> diakses pada tanggal 22 September 2020

Kompas, "Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali: Hanya 2 Provinsi yang Tunjukkan Hasil", <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/14463131/alasan-pemerintah-perpanjang-ppkm-jawa-bali-hanya-2-provinsi-yang-tunjukkan> diakses pada tanggal 27 Maret 2021

Kompas, "Apa Beda PSBB dengan PPKM Darurat? Ini Penjelasan Menko Luhut", <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/02/11461111/apa-beda-psbb-dengan-ppkm-darurat-ini-penjelasan-menko-luhut?page=all>. diakses pada tanggal 17 Agustus 2021

Kompas, "BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all> diakses pada tanggal 22 September 2020

Kompas, "Jakarta Berlakukan PSBB, Ridwan Kamil Pilih Terapkan PSBM, Apa itu?", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/15/123500665/jakarta-berlakukan-psbb-ridwan-kamil-pilih-terapkan-psbm-apa-itu?page=all> diakses pada tanggal 30 Maret 2021

Kompas, "Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Mikro Hingga 5 April 2021", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/13551421/pemerintah-kembali-perpanjang-ppkm-mikro-hingga-5-april-2021?page=all> diakses pada tanggal 21 Maret 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/08/16540001/pemerintah-perpanjang-ppkm-mikro-14-hari-berlaku-9-22-maret-2021?page=all> diakses pada tanggal 17 Maret 2021

Kompas, "Tak Lagi Gunakan PSBB, Jakarta Ikut Pusat Gunakan Istilah PPKM Berbasis Mikro", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/09/15461241/tak-lagi-gunakan-psbb-jakarta-ikut-pusat-gunakan-istilah-ppkm-berbasis?page=all> diakses pada tanggal 6 Maret 2021

Kompas, "Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember", <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/20081691/tok-dpr-dan-pemerintah-sepakat-pilkada-tetap-digelar-9-desember> diakses pada tanggal 22 September 2020

Kontan, "Inilah beda PPKM Jawa Bali dengan PPKM Mikro 9 hingga 22 Februari 2021", <https://kesehatan.kontan.co.id/news/inilah-beda-ppkm-jawa-bali-dengan-ppkm-mikro-9-hingga-22-februari-2021> diakses pada tanggal 16 Maret 2021

KRJogja, "Jogja Tak Kunjung Turun PPKM Meski Covid Melandai, Sekda DIY Penasaran?", <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/jogja-tak-kunjung-turun-ppkm-meski-covid-melandai-sekda-diy-penasaran/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2021

Medcom, "Pemkot Solo Siapkan Sanksi Tegas Pelanggar PPKM Darurat", <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8Kyj4mXN-pemkot-solo-siapkan-sanksi-tegas-pelanggar-ppkm-darurat> diakses pada tanggal 30 September 2021.

Media Indonesia, "Plus Minus Lockdown", <https://mediaindonesia.com/infografis/298021/plus-minus-lockdown> diakses pada tanggal 25 Maret 2021

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/ppkm-mikro-kelurahan-diganti-psbm> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, “PSBM”, <https://sumbarprov.go.id/home/news/19460-psbm> diakses pada tanggal 15 Agustus 2021

Radio Republik Indonesia, “Mengenal Perbedaan PSBB dan Lockdown”, <https://rri.co.id/humaniora/info-publik/826381/mengenal-perbedaan-PSBB-dan-lockdown> diakses pada tanggal 03 Januari 2021

Republika, “Total Positif COVID-19 di RI Tembus 200 Ribu Kasus”, <https://republika.co.id/berita/qgc15e409/total-positif-covid19-di-ri-tembus-200-ribu-kasus> diakses pada tanggal 10 September 2020

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Mendagri Keluarkan Instruksi Mengenai PPKM Mikro dan Pembentukan Posko COVID-19 Tingkat Desa & Kelurahan", <https://setkab.go.id/mendagri-keluarkan-instruksi-mengenai-ppkm-mikro-dan-pembentukan-posko-covid-19-tingkat-desa-kelurahan/> diakses pada tanggal 17 Juni 2021

Suara Surakarta, "Terapkan PPKM Level 2, Aktivitas di Kota Solo Semakin Longgar", <https://surakarta.suara.com/read/2021/10/04/194559/terapkan-ppkm-level-2-aktivitas-di-kota-solo-semakin-longgar?page=all> diakses pada tanggal 28 September 2021

Tempo, "PPKM Level 3 Yogyakarta: Ramai Wisatawan, Gumaton Jadi Sorotan, Satpol PP Kurang", <https://travel.tempo.co/read/1505216/ppkm-level-3-yogyakarta-ramai-wisatawan-gumaton-jadi-sorotan-satpol-pp-kurang> diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.



**Perbandingan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19 Pada Kebijakan PSBB**

**dan PPKM di Provinsi DKI Jakarta**

RIFQY MAULANA AZHAR, Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Tirto, “Apa Itu PSBB, PSBM dan Pembatasan Sosial Berskala Kecil?”, [https://tirto.id/apa-itu-](https://tirto.id/apa-itu-psbb-psbm-dan-pembatasan-sosial-berskala-kecil-f4yD)

[psbb-psbm-dan-pembatasan-sosial-berskala-kecil-f4yD](https://tirto.id/apa-itu-psbb-psbm-dan-pembatasan-sosial-berskala-kecil-f4yD) diakses pada tanggal 17 Maret

2021

Tirto, “Arti PSBB yang Dibuat untuk Cegah Penyebaran Corona di Indonesia”,

[https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-](https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-eMXT)

[eMXT](https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-eMXT) diakses pada tanggal 21 Januari 2021

Univeristas Indonesia, "Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum",

<https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>

diakses pada tanggal 29 September 2021.